

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya suatu Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk menambah pemasukan negara. Pemerintah perlu memperoleh pemasukan dana tersebut dengan melakukan suatu pemungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan kata pajak. Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti, yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan perkembangan masyarakat, dibuatlah suatu aturan yang lebih baik dan sifatnya memaksa berkaitan dengan pemberian itu dengan memperhatikan unsur keadilan. Agar memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikut sertakan dalam pembuatan berbagai aturan dalam pemungutan pajak, yang hasilnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Berkembangnya masyarakat yang akhirnya membentuk suatu negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak melatarbelakangi dibuatnya suatu ketentuan berupa undang-undang (UU) yang mengatur tentang tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak yang harus dipungut, pihak yang harus membayar pajak, dan besarnya pajak yang harus dibayar.

Dalam memahami mengapa harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan negara yang terus dilaksanakan, maka perlu mengerti tentang pengertian pajak itu sendiri. dalam menyelenggarakan pemerintahan, suatu negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, untuk

tercapainya kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupan rakyatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam pembukuan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Salah satu jenis pajak yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan disemua jenis jalan darat dan dilaut.

Salah satu jenis dari pajak kendaraan bermotor yaitu membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak progresif. Pajak progresif merupakan pajak tambahan yang dikenakan bagi perorangan yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama, baik kendaraan roda dua ataupun roda empat. Hanya saja kendaraan roda dua yang dikenakan pajak progresif bila mempunyai ≥ 250 *Cubical Centimetre* (CC), dan untuk semua kendaraan roda empat tidak ada pembedanya. Seringkali wajib

pajak yang menghindari pajak progresif dengan mengatas namakan kendaraannya dengan nama orang lain sehingga wajib pajak tersebut tidak dikenakan pajak progresif.

Manfaat Pajak Progresif untuk menambah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menekan angka kepemilikan kendaraan pribadi sehingga bisa mengurangi kemacetan. Selain itu dampak negatif pajak progresif terhadap wajib pajak yakni masyarakat sebagai wajib pajak merasa terbebani atas pengenaan pajak progresif tersebut.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu instansi dalam pemerintahan daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik berupa barang dan jasa secara langsung kepada masyarakat. Samsat dimaksudkan untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat pelayanan pajak kepada masyarakat. Sistem administrasi pelayanan publik ini dilakukan oleh tiga instansi pemerintahan dalam satu gedung. Kerjasama yang dilakukan ini meliputi beberapa instansi pemerintahan diantaranya Polri, Dinas Pendapatan Daerah dan PT Jasa Raharja (PERSERO). Polri memiliki fungsi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Dinas Pendapatan Daerah menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang berkaitan dengan pemasukan uang kas Negara. Untuk meningkatkan pemasukan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor yang harus dicapai untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah. Realisasi pajak kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan tentu dapat mempengaruhi besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu diharapkan masyarakat yang belum mengerti tentang pajak progresif dapat mengetahui tentang pajak progresif kendaraan bermotor khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN TARIF PROGRESIF PADA KANTOR SAMSAT SIDOARJO “**

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam studi lapang ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor di samsat sidoarjo
2. Untuk mengetahui potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif progresif

1.3 Manfaat Studi Lapang

Studi lapang diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca

antara lain:

1. Memberikan pemahaman praktek kerja tentang pajak progresif dan perhitungannya secara tepat.
2. Menambah pengetahuan tentang ilmu perpajakan terutama pajak progresif

3. Melatih mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja, dan kompak dalam kerja sama team.
4. Menambah wawasan dan referensi tentang pajak progresif dan perhitungannya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Pada pembahasan ini penulis membahas tentang ruang lingkup, perhitungan, pengenaan, dan tata cara pemungutannya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tahun 2017 kantor bersama satuan administrasi manunggal satu atap (SAMSAT).

1.5 Metode Pengumpulan Data

A) Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

- 1) Wawancara, dilakukan untuk memperoleh data mengenai pajak progresif dan pajak kendaraan bermotor dan wawancara dilakukan dengan Dra Henni Dianawati selaku bagian tata usaha di UPT Kota Sidoarjo
- 2) Observasi, penulis meneliti tentang tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor menggunakan tarif progresif
- 3) Dokumentasi, mengumpulkan data potensi pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah.

B) Jenis data yang diambil yaitu:

- 1) Data sekunder, adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa data, buku, dokumentasi dan arsip-arsip resmi dari UPT kota Sidoarjo.

